Tanggapan terhadap Riset TII

Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Kandidasi Perempuan dalam Pemilu 2024 Studi Kasus: Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia (Felia Primaresti)

"Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia: Penguat atau Pelengkap?"
Diskusi *Initiative* the Indonesian Institute

Yolanda Panjaitan (Cakra Wikara Indonesia)
Jakarta, 27 November 2023

Tanggapan (1)

- Apresiasi atas tema riset; masih perlu lebih banyak kajian untuk tema ini. Secara umum, laporan riset ini mudah dipahami, ditulis dengan baik, pendekatan dan teori yang digunakan dirumuskan dengan jelas.

- Istilah-istilah asing dalam laporan dapat dialihbahasakan atau paling tidak dimaknai sehingga dapat dipahami oleh pembaca lebih luas.

- Dalam abstrak, dapat ditambahkan penggunaan kerangka teori dari Hazan dan Rahat (1993), selain Pippa Norris.

CAKRA WIKARA INDONESIA

Tanggapan (2)

- Penulis bisa menjelaskan lebih lanjut sumber data primer (dari wawancara mendalam), paling tidak profil informannya.

- Penggunaan pemikiran Norris dalam riset: dapat dijelaskan lebih jauh pengaruh sistem kepartaian terhadap kandidasi. Penjelasan sistem hukum dan sistem pemilu juga dapat ditambahkan agar terbangun penjelasan yang elaboratif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan lebih dalam dengan cara menyajikan data lebih lanjut: mis. soal perempuan dalam kepengurusan partai, apakah di posisi strategis (lakukan analisis lebih jauh); penempatan perempuan dalam DCS (apakah di nomor urut atas dan di dapil basis partai).

- Penulis perlu melengkapi pencantuman referensi dalam daftar pustaka, sehingga pembaca dapat mengetahui apakah penulis membaca langsung dari sumbernya atau mengutip dari tulisan/riset pihak lain.

CAKRA WIKARA INDONESIA

Tanggapan (3)

- Dalam pembahasan, penulis dapat menambahkan penjelasan afirmasi internal di PSI dan Partai Ummat. Saat ini, AD/ART kedua partai menyebutkan ketentuan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan, namun belum ada afirmasi untuk pencalonan perempuan dalam pemilu legislatif*.

- Selain itu, dapat ditambahkan **pentingnya penguatan afirmasi dalam Peraturan KPU** untuk Pemilu sehingga seluruh partai politik peserta pemilu berhasil memenuhi minimal 30% pencalonan perempuan di seluruh dapil pada Pemilu 2014 dan 2019 (tidak terjadi pada pencalonan Pemilu 2004 dan 2009, serta 2024)

*AD/ART PSI: https://www.munawir.id/wp-content/uploads/2021/10/AD-ART-PSI.pdf
*AD/ART P. Ummat: https://www.scribd.com/document/534075066/Buku-Saku-Partai-Ummat-ver-01-120921

CAKRA WIKARA INDONESIA

Tanggapan (4)

- Sejalan dengan hasil riset ini, CWI pernah mengajukan premis dalam salah satu risetnya bahwa partai politik baru di Indonesia cenderung memiliki angka pencalonan perempuan yang tinggi dalam pemilu legislatif.*
  - Diperlukan kajian lebih lanjut mengapa partai politik baru justru tinggi angka kandidasinya (di atas 40%), meski mungkin sekadar memenuhi syarat administratif.

- Menyepakati rekomendasi yang diajukan dalam laporan riset ini, dalam hal pentingnya pembenahan internal partai politik terutama dalam kaderisasi, rekrutmen, dan pencalonan. Di sisi lain, pemahaman publik mengenai peran kunci partai politik dalam penguatan partisipasi dan representasi perempuan juga perlu ditingkatkan, untuk menguatkan pengawasan publik terhadap kinerja partai politik.

* Data CWI: partai-partai baru cenderung tinggi angka kandidasi perempuannya sementara tiga partai peraih suara tertinggi (PDIP, Gerindra, Golkar) di Pemilu 2019 justru yang terendah angka pencalonan perempuannya. Lihat https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Menyoal-Data-Representasi-Perempuan-Edisi-Revisi-05042022-FINAL-Copy.pdf

TERIMA KASIH

TWITTER | INSTAGRAM:
@cakrawikara

FACEBOOK | LINKEDIN | YOUTUBE:
Cakra Wikara Indonesia

WEBSITE:
cakrawikara.id

CAKRA WIKARA INDONESIA